

PENGARUH KEMANDIRIAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH

Galang Samudra
gsamudraa1@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of local independence, economic growth, and population on capital expenditure policy of districts and cities in Gerbangkertosusila of East Java during 2013-2018. The population was districts and cities in Gerbangkertosusila of East Java during 2013-2018. Moreover, the instrument in data collection techniques using documentation. Furthermore, the data secondary which taken from website of Regional Financial and Asset Management Agency and Central Statistics Agency. Additionall, pre-requisite test for data analysis used normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and heterocedasticity test. In addition, hypothesis test used multiple linear regression with t-test, f-test, and determination coefficient test. The research result concluded local independence had positive effect on capital expenditure policy of districts and cities in Gerbangkertosusila of Java. On the other hand, economic growth did not effect capital expenditure policy of districts and cities in Gerbangkertosusila of Java. In contrast, population had positive effect on capital expenditure policy of districts and cities in Gerbangkertosusila of Java.

Keywords: local independence, economic growth, population, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap kebijakan belanja modal Kabupaten dan kota di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur tahun 2013-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan kota di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur tahun 2013-2018. Selain itu, instrumen dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Kemudian data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui website Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistika. Sebagai tambahan, Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kebijakan belanja modal di Kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila di Jawa Timur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kebijakan belanja modal di Kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila di Jawa Timur. Berbeda dengan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kebijakan belanja modal di Kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila di Jawa Timur.

Kata kunci: kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, belanja modal

PENDAHULUAN

Belanja modal adalah pengeluaran yang memiliki manfaat untuk menambah suatu aset dan bertujuan untuk membangun dan mensejahterahkan daerah. Pemerintah sangat berperan penting dalam memajukan daerahnya dengan cara menetapkan anggaran belanja modal yang tepat sasaran agar nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat hasil belanja modal yang telah dilaksanakan. Penetapan belanja modal yang tepat adalah langkah dan kesempatan yang dapat dimaksimalkan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Belanja modal yang produktif adalah belanja modal yang digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaan yang

sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset untuk kepentingan masyarakat.

Belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya dengan melakukan pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati manfaat dari pembangunan daerah serta dapat juga merasakan kepemimpinan pemerintahan yang adil. Sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah menggunakan belanja modal dengan baik sehingga nantinya pemerintah lebih bersemangat dalam melakukan pelayanan publik. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sarana prasarana yang dibangun dengan baik dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian yang berdampak pada kemajuan suatu daerah dan juga dapat menarik para investor dalam membangun usahanya di daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan juga pendapatan daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang digunakan untuk dialokasikan secara adil dan merata kepada masyarakat, agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat di daerah (Kawedar, 2008).

Kemandirian daerah adalah seberapa besar kemampuan daerah dalam membangun daerahnya sendiri melalui sumber daya keuangan yang ada dan tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat leluasa menggunakan dana-dana yang ada untuk dipergunakan membangun daerah dan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian daerah dengan mengelola pendapatan daerah, kekayaan daerah dan aset yang ada di daerah untuk kepentingan rakyat. Dengan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada dengan baik maka daerah dapat bersaing dengan daerah lain untuk menuju otonomi daerah. Pemerintah haruslah bijak dalam menetapkan belanja modal daerah, dengan cara meninjau langsung daerahnya dan mengamati kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh daerah dan juga pemerintah harus menyesuaikan pendapatan asli daerahnya. Besar kecilnya belanja modal ditentukan oleh pendapatan asli daerah, oleh karena itu jika pemerintah ingin memberikan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus mengoptimalkan kemampuan masyarakat agar pendapatan asli daerah meningkat sehingga belanja modal juga dapat meningkat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek sangat baik untuk dikembangkan dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola secara profesional sebagai optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pemungutannya seperti subyek dan obyek pajak daerah. Pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat otomatis belanja daerah juga akan meningkat, tetapi jika pendapatan asli daerah rendah atau turun maka belanja daerah akan rendah. Menurut Halim (2004) kemandirian keuangan daerah/otonomi fiskal adalah kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan seperti untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah berdampak pada pembangunan dimasa yang akan datang yang dapat menjadi penentu arah

pembangunan selanjutnya. Suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan ikut meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, maka pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar apa yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi haruslah dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja, karena jika tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja dapat mengakibatkan suatu ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan yang meningkat yang dapat menghambat pertumbuhan suatu daerah. Peningkatan pembangunan daerah sangatlah penting, karena diharapkan dengan adanya pembangunan daerah yang lebih baik nantinya dapat menggundang para investor untuk membangun usaha di daerah, untuk mempermudah investor membangun usaha di daerah haruslah dibarengi dengan kemudahan akses bagi para investor dalam membangun usahanya di daerah, dengan adanya pembangunan usaha yang dilakukan oleh para investor diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menambah fasilitas yang memadai di daerah. Konsekuensinya adalah pemerintah harus menambah anggaran belanja modal. Halim (2014: 107) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang bertujuan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi disuatu daerah. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), Penduduk Indonesia adalah sekumpulan orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Penduduk sangat berperan penting untuk peningkatan belanja daerah. Penduduk juga adalah unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena penduduk dapat meningkatkan usaha produksi dan sebagai penyedia tenaga kerja, usahawan, tenaga ahli dan untuk memimpin perusahaan. Anggaran belanja modal pemerintah daerah haruslah digunakan untuk menunjang kebutuhan dan kepentingan penduduk, jumlah penduduk yang bertumbuh semakin meningkat akan mengakibatkan kebutuhan disuatu daerah semakin kompleks. Jumlah penduduk yang sangat besar dapat berdampak pada kemampuan suatu daerah dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan penduduk, oleh karena itu dengan bertambahnya jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah jika pemerintah daerah dapat memberikan solusi kepada penduduk dengan menggunakan anggaran belanja modal dengan bijak dengan memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan kesempatan kerja. Dengan demikian jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak menjadi beban namun akan menjadi aset pemerintah dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Ivana (2009) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2002-2006. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dapat diterima, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ditolak, jadi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Tania (2013) Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen menggunakan variabel non keuangan yaitu Jumlah Penduduk dan variabel keuangan yaitu

Kemandirian Daerah. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yaitu DAU, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi. Sampel yang digunakan yaitu Pulau Sumatera baik kabupaten maupun kota. Waktu yang diambil memiliki rentan waktu tahun 2007-2011. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan sebesar terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera pada tahun 2007-2011. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera pada tahun 2007-2011. Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan sebesar terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera pada tahun 2007-2011. Penelitian yang dilakukan Huda (2015) menyatakan bahwa Kepadatan Penduduk/Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: (1)Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur ? (2) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur ? (3) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur ?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah, yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: (1) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur. (2) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur. (3) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Federalisme Fiskal

Teori federalisme fiskal adalah teori yang menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan perekonomian disuatu daerah yang tujuannya adalah untuk melayani publik dan mensejahterahkan daerah. Dengan adanya desentralisasi dapat mempermudah suatu daerah dalam membangun daerahnya lebih maju dan kebutuhan publik akan terpenuhi. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal mampu berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Artinya ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan dan merancang kebijakan peraturan tentang ekonomi lokal, otomatis campur tangan pemerintah pusat akan menjadi sangat terbatas (Tiebout, 1956).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi yang lebih besar yang dimiliki masyarakat untuk dimanfaatkan dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian di daerah. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pemerintah daerah perlu memberikan inovasi, motivasi dan keterampilan pada daerah, agar nantinya daerah semakin hari semakin mengalami peningkatan kesejahteraan. Teori Federalisme Fiskal (*Teori fiscal federalism*) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman untuk masyarakat supaya masyarakat mengerti hal-hal mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kepentingan daerah serta menambah aset tetap dan aset lainnya di daerah, pengeluaran anggaran belanja modal memiliki manfaat satu periode akuntansi. Saragih (2003) menyatakan bahwapemanfaatan belanja modal harusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif yang dapat memajukan suatu daerah, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat nantinya dapat menikmati hasil dari kinerja pemerintah daerah. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pemeliharaan aset dan menambah manfaat sarana dan prasana yang ada di daerah sehingga aset yang ada dapat terawat dengan baik dan penambahan manfaat sarana dan prasarana juga nantinya dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya dengan melakukan pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati manfaat dari pembangunan daerah serta dapat juga merasakan kepemimpinan pemerintahan yang adil. Sarana prasarana yang dibangun dengan baik dapat menunjang dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian yang berdampak pada kemajuan suatu daerah dan juga dapat menarik para investor dalam membangun usahanya di daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan juga pendapatan daerah.

Belanja modal memiliki dua kategori yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang memiliki hubungan dengan kegiatan pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung dengan program, seperti bunga, subsidi, hibah belanja pegawai, dan biaya tidak terduga. Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama Syaiful (2006) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. Alokasi belanja modal dibuat bertujuan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah dan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan.

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah bagaimana caranya pemerintah daerah dapat menggali potensi dan memanfaatkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menurunkan kebergantung pada bantuan pemerintah pusat, karena jika suatu daerah terus bergantung pada pemerintah pusat, maka daerah tersenut akan tertinggal dari daerah lain. Hal ini dapat menggambarkan keberhasilan suatu kinerja kepemimpinan pemerintah daerah jika pemerintah daerah dapat membimbing masyarakat untuk membangun daerahnya.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian daerah dengan mengelola pendapatan daerah, kekayaan daerah dan aset yang ada di daerah untuk kepentingan rakyat. Dengan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada dengan baik maka daerah dapat bersaing dengan daerah lain untuk menuju otonomi daerah. Besar kecilnya belanja modal ditentukan oleh pendapatan asli daerah, oleh karena itu jika pemerintah ingin memberikan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus megoptimalkan kemampuan masyarakat agar pendapatan asli daerah meningkat sehingga belanja modal juga dapat meningkat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek sangat baik untuk dikembangkan dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola secara profesional sebagai optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pemungutannya seperti subyek dan obyek pajak daerah. Pajak daerah memiliki kontribusi

yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat otomatis belanja daerah juga akan meningkat, tetapi jika pendapatan asli daerah rendah atau turun maka belanja daerah akan rendah.

Tingkat kemandirian tidak lepas dari terciptanya hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menciptakan kemandirian daerah yang lebih baik (Halim, 2007:233).

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan yang harus dicapai oleh daerah karena berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus juga dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja yang memadai, karena laju pertumbuhan ekonomi selalu dibarengi dengan tingkat kenaikan jumlah penduduk, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, maka pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar apa yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan masyarakat.

Daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat namun jika pertumbuhan ekonomi menurun maka pendapatan asli daerah juga akan menurun. Jika pemerintah ingin terus menaikkan laju pertumbuhan ekonomi maka pemerintah harus membangun sarana dan prasarana dengan baik sehingga belanja modal yang telah ditetapkan membuahkan hasil.

Peningkatan pembangunan daerah sangatlah penting, karena diharapkan dengan adanya pembangunan daerah yang lebih baik nantinya dapat mengundang para investor untuk membangun usaha di daerah, untuk mempermudah investor membangun usaha di daerah haruslah dibarengi dengan kemudahan akses bagi para investor dalam membangun usahanya di daerah, dengan adanya pembangunan usaha yang dilakukan oleh para investor diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin hari semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah berdampak pada pembangunan dimasa yang akan datang yang dapat menjadi penentu arah pembangunan selanjutnya. Suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan ikut meningkat. Tingginya aktivitas dalam investasi ini dapat juga mendorong suatu pertumbuhan ekonomi dan pada waktunya akan memberikan dampak pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat sehingga dapat membangun suatu daerah agar lebih maju dari sebelumnya dan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di daerah (Bappenas, 2003).

Pertumbuhan Ekonomi menerangkan dan mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Menurut Sukirno (2015: 423) dalam kegiatan perekonomian yang baik adalah ketika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan produksi barang dan jasa yang terus berlaku di suatu negara, seperti pertambahan adanya jumlah produksi barang industri yang semakin meningkat, perkembangan pembangunan sarana dan prasarana, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan produksi barang modal serta kesempatan kerja.

Jumlah Penduduk

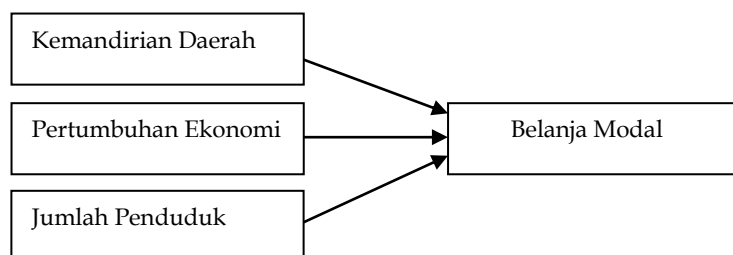
Jumlah penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di suatu wilayah Negara. Menurut Badan Pusat Statistika (2010) bahwa Jumlah penduduk merupakan semua orang

yang berdomisili disuatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk yang besar berarti dapat menimbulkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan penambahan sarana prasarana bagi penduduk yang berada disuatu daerah dan penambahan permintaan faktor konsumsi. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena penduduk dapat meningkatkan usaha produksi dan sebagai penyedia tenaga kerja, usahawan, tenaga ahli dan untuk memimpin perusahaan. Anggaran belanja modal pemerintah daerah haruslah digunakan untuk menunjang kebutuhan dan kepentingan penduduk.

Jumlah penduduk yang sangat besar dapat berdampak pada kemampuan suatu daerah dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan penduduk, oleh karena itu dengan bertambahnya jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah jika pemerintah daerah dapat memberikan solusi kepada penduduk dengan menggunakan anggaran belanja modal dengan bijak dengan memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan kesempatan kerja. Dengan demikian jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak menjadi beban namun akan menjadi aset pemerintah dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan variabel-variabel penelitian yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal

APBD dalam PP No 58 Tahun 2005, menyatakan bahwa APBD disusun untuk penyelenggaraan pemerintah dalam membangun daerah dan menghasilkan pendapatan daerah semaksimal mungkin, guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun daerahnya. Pemerintah dalam menetapkan anggaran belanja modal harus meninjau dengan baik kebutuhan apa yang diperlukan daerah, serta pemerintah juga harus melihat dan mempertimbangkan berapa pendapatan daerah yang diterima. Jika pemerintah ingin meningkatkan belanja modal maka pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi.

Menurut Sianipar (2011) variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Mildawati (2016) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif juga terhadap Belanja Modal. Artinya jika pemerintah ingin mendapatkan belanja modal yang tinggi dan maksimal maka pemerintah harus

meningkatkan kemampuan masyarakat agar pendapatan asli daerah semakin bertambah selain itu pemerintah juga harus memberikan inovasi dan keterampilan pada masyarakat. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menetapkan anggaran belanja modal yang adil dan tepat sasaran sehingga belanja modal yang telah ditetapkan dapat dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka pemerintah juga harus meningkatkan anggaran belanja modal untuk menambah pembangunan daerah agar dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Oates (1995) menyatakan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Seperti faktor sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan, transportasi, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan argumen dan teori tersebut kebijakan desentralisasi dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi di daerah, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan investasi modal pemerintah dan swasta. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa salah satu indikator penentuan kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Jumlah penduduk dapat dipandang oleh pemerintah daerah sebagai aset modal yang tinggi dan sebagai suatu perencanaan pembangunan dan sekaligus menjadi beban dalam perencanaan pembangunan. Penduduk juga adalah unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena penduduk dapat meningkatkan usaha produksi dan sebagai penyedia tenaga kerja, usahawan, tenaga ahli dan untuk memimpin perusahaan.

Anggaran belanja modal pemerintah daerah haruslah digunakan untuk menunjang kebutuhan dan kepentingan penduduk, jumlah penduduk yang bertumbuh semakin meningkat akan mengakibatkan kebutuhan disuatu daerah semakin kompleks ketika kebutuhan penduduk terpenuhi maka aktivitas perekonomian disuatu daerah berkembang dan penduduk dapat turut serta menambah anggaran belanja modal dan turut serta dalam meningkatkan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Devita *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian dengan melihat karakteristik masalah berupa hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih serta berupa data dan angka-angka (Sugiyono, 2014: 74). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, sumber data diperoleh melalui instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistika (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur.

Gambaran dari Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2009:61). Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila yang berada Provinsi Jawa Timur yang telah menerbitkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara lengkap pada tahun 2013-2018.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan dan jenis pengumpulan data melalui sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data diperoleh melalui instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistika (BPS) (www.bps.go.id) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (<http://bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/>) tahun 2013-2018 di Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Pembagian variabel berdasarkan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen atau juga dikenal variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variasi perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen (Suliyanto, 2011:7). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk.
2. Variabel dependen, merupakan variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen (Suliyanto, 2011:8). Variabel dependen dalam penelitian adalah Belanja Modal.

Definisi Operasional Variabel

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menambah aset tetap dan aset lainnya di daerah, serta memiliki manfaat satu periode akuntansi. Belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya adalah dengan melakukan pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dengan semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati manfaat dari pembangunan daerah dan masyarakat dapat juga merasakan kepemimpinan pemerintahan yang adil. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi meningkat semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah juga dapat menggunakan belanja modal untuk kegiatan pemerintahan dalam pengalokasian dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal dihitung dengan rumus Halim (2007:101).

$$BM : BT + BPM + BGB + BJI$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin
 BGB : Belanja Gedung dan Bangunan
 BJIJ : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat dan daerah menjadi mandiri dan dapat memaksimalkan kekuatan yang dimiliki daerah.

Kemandirian daerah dihitung dengan rumus (Halim, 2007:233).

$PAD : PD + RD + HPKDD + LLPAD$

Keterangan:

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

HPKD : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LLPAD : Lain-lain PAD yang Sah

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu daerah, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui meningkatnya kegiatan perekonomian disuatu daerah dan juga pembangunan sarana dan prasarana. Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang berdasarkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang berlaku. PDRB akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2010. (www.bps.go.id)

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mereka yang sudah menetap disuatu wilayah paling sedikit enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena penduduk dapat meningkatkan usaha produksi dan sebagai penyedia tenaga kerja, usahawan, tenaga ahli dan untuk memimpin perusahaan. Anggaran belanja modal pemerintah daerah haruslah digunakan untuk menunjang kebutuhan dan kepentingan penduduk dan pembangunan sarana dan prasarana bagi penduduk sehingga penduduk dapat merasakan kinerja dari pemerintahan daerah. Indikator jumlah penduduk adalah total jumlah penduduk pertahun.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dengan variabel dependen belanja modal. Teknik analisis data melalui beberapa tahapan penelitian. Tahapan yang penelitian dengan menganalisis data adalah menghitung variabel independen dan melakukan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan model analisis dan hipotesis. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan SPSS (*Statistic Program for Social Science*) 23.0 for windows.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel dan nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak (Suliyanto, 2011:69). Model regresi yang baik pada prinsipnya normalitasnya dapat dideteksi dengan cara melihat data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan: (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal; (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal. Selain menggunakan grafik Normal P-Plot terdapat salah satu uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai Sig atau signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi adalah normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2017:33). Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah: (1) Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas; (2) Jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka terdapat korelasi yang terlalu besar di antara salah satu variabel independen dengan variabel-variabel independen yang lain yang artinya terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$, jika ada korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2017:93). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson* (*DW test*). Deteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu: (1) Nilai DW dibawah -2 maka terdapat korelasi positif; (2) Nilai DW diantara -2 sampai 2 maka tidak terdapat autokorelasi; (3) Nilai DW diatas 2 maka terdapat korelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya dengan menggunakan grafik *scatterplot* dengan dasar analisis sebagai berikut (Ghozali, 2017:49): (1) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Regresi Linear Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi adanya kekuatan antara seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992).

Persamaan regresi adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1KD + \beta_2PE + \beta_3JP + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal (BM)
 α : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Slope atau koefisien regresi
 KD : Kemandirian Daerah
 PE : Pertumbuhan Ekonomi
 JP : Jumlah penduduk
 e : error

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*) atau dapat disebut juga dengan uji F ini, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen sesuai sebagai variabel penjelas terhadap variabel dependen. kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut: (1) Jika uji signifikansi $F \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $F \geq 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Uji statistik t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual parsial. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$. (1) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya; (2) Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
 Pengujian Deskriptif Variabel Penelitian
 (Jutaan Rupiah)
 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	50276,00	5973031,37	1036092,6419	1496081,64582
PDRB	36	16204,00	38733300,00	6438816,7222	12543634,88905
JP	36	123806,00	2885555,00	1420139,8889	881225,44869

BM	36	29411,00	2515390,08	650828,7775	608393,07463
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Kemandirian Daerah

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa obeservasi (N) penelitian ini sebesar 36. Nilai Kemandirian Daerah terkecil adalah sebesar Rp50.276,00 yang di miliki oleh Kabupaten Gresik di tahun 2013 dan nilai terbesar Kemandirian Daerah adalah Rp5.973.031,37 yang dimiliki oleh Kota Surabaya di tahun 2018. Rata-rata nilai Kemandirian Daerah di Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang berada Jawa Timur tahun 2013-2018 adalah sebesar Rp1.036.092,64 sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp1.496.081,64.

Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tabel 1 diatas pada variabel Pertumbuhan Ekonomi nilai terkecil adalah sebesar Rp16.204,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan di tahun 2013 dan nilai terbesar Pertumbuhan Ekonomii adalah Rp38.733.300,00 yang di miliki oleh Kota Surabaya di tahun 2018. Rata-rata nilai Pertumbuhan Ekonomi di Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang berada Jawa Timur tahun 2013-2018 adalah sebesar Rp6.438.816,72 sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp12.543.634,88.

Jumlah Penduduk

Dari Tabel 1 diatas pada variabel Jumlah Penduduk nilai terkecil adalah sebesar 123.806,00 jiwa yang dimiliki oleh Kota Mojokerto di tahun 2013 dan nilai terbesar Jumlah Penduduk adalah 2.885.555,00 jiwa yang di miliki oleh Kota Surabaya di tahun 2018. Rata-rata nilai Jumlah Penduduk di Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang berada Jawa Timur tahun 2013-2018 adalah sebesar 1.420.139,88 sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar 881.225,44.

Belanja Modal

Dari Tabel 1 diatas pada variabel Belanja Modal nilai terkecil adalah sebesar Rp29.411,00 yang di miliki oleh Kabupaten Bangkalan di tahun 2013 dan nilai terbesar Belanja Modal adalah Rp2.515.390,08 yang dimiliki oleh Kota Surabaya di tahun 2017. Rata-rata nilai Belanja Modal di Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang berada Jawa Timur tahun 2013-2018 adalah sebesar Rp650.828,77 sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp608.393,07.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual normal asumsi regresi terpenuhi yang berarti pengujian grafik dan *One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test* konsisten dan data berdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	36

	Mean	,0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	137531,32928310
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,093
	Negative	-0,80
Test Statistic		0,93
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

Sumber: Data Sekunder Diolah, (2020)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,163	6,124	Bebas Multikolinearitas
PDRB	0,213	4,687	Bebas Multikolinearitas
JP	0,391	2,555	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder Diolah, (2020)

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 diatas diketahui nilai *tolerance* Kemandirian sebesar 0,163, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,213, dan Jumlah Penduduk sebesar 0,391. Sedangkan untuk nilai VIF untuk Kemandirian sebesar 6,124, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,687, dan Jumlah Penduduk sebesar 2,555. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel independen $> 0,01$ dan nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

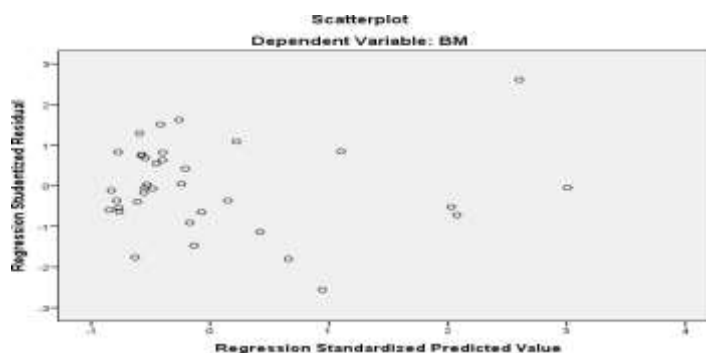
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b	
	Durbin-Watson	
1	1,591	

Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,591 dan nilai tersebut terletak berada diantara -2 dan 2 jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari autokorelasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2
Grafik Scatterplot
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 grafik *scatterplot* diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standarized Coefficients		t hitung	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1. (Constanta)	106499,056	51292,259			2,076	0,046
PAD	,278	,040	,684		6,916	0,000
PDRB	,006	,004	,117		1,349	0,187
JP	,155	,044	,224		3,508	0,001

a. Dependent Variable: BM
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa konstanta regresi (a) memiliki nilai yaitu 106.499,05. Kemandirian Daerah memiliki nilai 0,278, Pertumbuhan Ekonomi 0,006, dan Jumlah Penduduk adalah 0,155. Dengan demikian berdasarkan hasil pada tabel 5 nilai-nilai tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BM = 106,499,05 + 0,278 PAD + 0,006 PDRB + 0,155 JP + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,974 ^a	0,949	0,944	143833,70701

a. Predictors: (Constant), JP,PDRB,PAD

b. Dependent Variable: BM
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Dari hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 6 diketahui nilai R^2 sebesar 0,944 atau 94,4%. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap variabel Belanja Modal untuk tahun berikutnya di Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila yang berada di Jawa Timur. Sedangkan sisa 5,6% merupakan faktor lainnya yang tidak ada di dalam penelitian namun juga berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*) atau disebut juga uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang keseluruhan atau sesuai terhadap variabel dependen. Jika uji signifikansi $F \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1229295433536	3	4097651445120,411	198,068	,000 ^b
1 Residual	662020328703,222	32	20688135271,976		
Total	1295497466406	35			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PAD,PDRB,JP

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) pada Tabel 7, nilai F sebesar 198,068 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga model penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t

Tabel 8
Hasil Uji Perhitungan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Thitung	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1. (Constant)	106499,056	51292,259			2,076	0,046
PAD	,278	,040	,684		6,916	0,000
PDRB	,006	,004	,117		1,349	0,187
JP	,155	,044	,224		3,508	0,001

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

H_1 : Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 8 besarnya variabel bebas kemandirian daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dengan nilai signifikan t sebesar 0,000, dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi $t < 0,05$. Hal ini menunjukkan H_1 diterima sehingga variabel bebas kemandirian berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H_2 : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 8 besarnya variabel bebas Pertumbuhan ekonomi adalah 0,006 dengan nilai signifikan t sebesar 0,187 berarti nilai signifikansi $t > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak sehingga variabel bebas pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

H_3 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 8 besarnya variabel bebas jumlah penduduk adalah 0,155 dengan nilai signifikan t sebesar 0,001, berarti nilai signifikansi $t < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima sehingga variabel bebas jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Kemandirian Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal". Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang artinya hasil penelitian diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara kemandirian daerah terhadap belanja modal. Dengan demikian ketika kemandirian daerah bertambah, maka belanja modal akan bertambah.

Tingkat kemandirian daerah mempengaruhi besarnya realisasi belanja modal pemerintah daerah, ketika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian yang meningkat maka sumber pendapatan daerah meningkat sehingga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan di daerah melalui belanja modal. Pembangunan daerah nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian. Dengan demikian ketika perekonomian meningkat pendapatan masyarakat juga daerah akan mengalami peningkatan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania (2013) menjelaskan bahwa Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti tingkat kemandirian daerah dapat mempengaruhi besarnya realisasi belanja modal pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin tinggi realisasi belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua menyatakan bahwa "Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal". Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,006 dengan nilai signifikan sebesar 0,187 yang berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam pembangunan suatu daerah, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi biasanya akan dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan belanja modal dari tahun ke tahun untuk membangun sarana dan prasarana di daerah atau untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran. Selain itu alokasi belanja modal yang tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk masyarakat akan tetapi digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan akan membuat produktivitas perekonomian menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merata yang mengakibatkan belanja modal tidak berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal juga disebabkan adanya faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri dan adanya aktivitas impor yang semakin meningkat di dibandingkan aktivitas ekspor. Dan juga kurangnya ketersediaan teknologi di bidang barang dan jasa yang lebih modern sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Hal inilah yang menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang berjudul pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ivana (2009) yaitu Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa "Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal". Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin tinggi juga belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Jumlah penduduk merupakan aset pemerintah dalam menaikan belanja modal. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar harus diikuti dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan jumlah penduduk di daerah dalam mengambil keputusan dalam penggunaan belanja modal. Jumlah penduduk merupakan informasi yang sangat diperlukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, dengan demikian dalam penggunaan belanja modal pemerintah daerah untuk membangun pelayanan publik, informasi tentang data jumlah penduduk sangat penting. Jadi bertambahnya jumlah penduduk akan menambah jumlah realisasi belanja modal. Penemuan ini mendukung penemuan Akbar (2011) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang berada di Jawa Timur tentang Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal periode 2013- 2018, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: : (1) Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal; (2) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal; (3) Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan belanja modal pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan pemerintah juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang merata dalam pengalokasian belanja modal sehingga sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang berdampak nantinya pada peningkatan belanja modal; (2) Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah penduduk yang besar di Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur sebagai aset dan bukan memandangnya

sebagai beban, karena jumlah penduduk yang besar jika pemerintah dapat mengendalikannya dengan baik maka belanja modal akan terus meningkat; (3) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain menambah jumlah sampel, peneliti selanjutnya disarankan mengambil data sampel di luar Jawa Timur untuk membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku juga kepada kabupaten/kota di provinsi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah pada Pemda di Sumatera Utara. *Tesis*. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2013-2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Jawa Timur*. BPKAD Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 2013-2018. *Jumlah Penduduk Jawa Timur*. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 2013-2018. *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
- Darwanto, 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Devita, A., Delis, A. dan Junaidi, 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2(1): 63-70.
- Ghozali, I. 2017. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Huda, A. S. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 5 (2).
- Ivana, Y. 2009. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah daerah (Studi empiris pada Provinsi Lampung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung FEB UNILA. Lampung.
- Kawedar, W. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tania, A. L. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- Mildawati, T. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5: 1-17.
- Oates, W. E. 1995. *Comment on "Conflict and Dilemmas of Desentralization" by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer. Los Angeles.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, 2nd ed. John Welly & Sons Ltd. New York.
- Sianipar, E. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

- Skripsi*. Universitas Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2007. *Makro ekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi SPSS*. Yogyakarta.
- Syaiful. 2006. Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>. 4 Maret 2012. (20.00).
- Tiebout, C. M. 1956. A Pure Theory Of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*. 64 (5): 416-424.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.